

## Desentralisasi fiskal dan tingkat kemiskinan di Indonesia

Syamsul

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti Palu

Email: syamsulsyahrir@gmail.com

### Abstrak

Kemiskinan laksana wabah mematikan yang terus diperangi oleh banyak negara, khususnya negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Isu peningkatan kesejahteraan tersebut menjadi salah satu argumen diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan masyarakat. Hasil regresi menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang diukur dengan dana perimbangan dan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat. Sementara itu, desentralisasi fiskal yang diprosikan dengan belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat di Indonesia.

**Kata Kunci:** Desentralisasi fiskal; tingkat kemiskinan

### *Fiscal decentralization and poverty levels in Indonesia*

#### *Abstract*

*Poverty is like a deadly epidemic that continues to be fought by many countries, especially developing countries including Indonesia. The issue of welfare improvement is one of the arguments for the implementation of the local autonomy policy and fiscal decentralization in Indonesia. This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization on the level of community poverty. The regression results indicate that fiscal decentralization as measured by balancing funds and local own revenue has a negative and significant effect on the level of poverty of the community. Meanwhile, fiscal decentralization that is proxied by capital expenditure has a negative and not significant effect on the level of poverty in Indonesia.*

**Keywords:** *Fiscal decentralization; poverty rate in Indonesia*

---

---

## PENDAHULUAN

Kemiskinan laksana wabah mematikan yang terus diperangi oleh banyak negara, khususnya negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017 masih cukup tinggi yaitu sebesar 10,6% (BPS, 2018). Lebih lanjut dari data yang ditunjukkan BPS, pada tahun 2017 masih terdapat 15 provinsi yang tingkat kemiskinannya berada di atas angka kemiskinan nasional. Sementara itu, daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan berada di atas angka 15%, yaitu Provinsi Papua Barat sebesar 20,9%, Provinsi Papua sebesar 20,4%, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 17,6%, Provinsi Maluku sebesar 16,6%, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 15,7% (lihat, lampiran).

Di Indonesia, isu tersebutlah yang menjadi salah satu argumen diterbitkannya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Regulasi tersebut, membawa pada implementasi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara menyeluruh di Indonesia. Hal ini karena diyakini, bahwa desentralisasi fiskal membuat pemerintah lebih dekat dengan masyarakat dan pejabat daerah memiliki informasi yang lebih baik tentang kebutuhan daerahnya, dan oleh karena itu lebih mampu menetapkan kebijakan yang optimal daripada pemerintah pusat (Silas, Wawire, & Okelo, 2018). Dengan demikian, kebijakan desentralisasi fiskal adalah bagian dari paket reformasi untuk meningkatkan efisiensi pemerintah (Oates, 1993). Peningkatan efisiensi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Silas et al., 2018; Agyemang-Duah et al., 2018).

Beberapa penelitian yang telah membahas terkait dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Bardhan and Mookherjee (1998) mengemukakan bahwa manajemen desentralisasi mengedepankan tujuan pengentasan kemiskinan di Bengal Barat, India. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Galasso and Ravallion (2001) untuk Bangladesh. Penelitian tersebut didukung oleh (Fan, Hazell, & Thorat, 2000 di India; Fan, 2004 di Cina; Fan, 2005 di Tanzania) dan Silas et al., (2018) di Kenya. Sebaliknya, Azfar dan Livingston (2002) dalam Martínez-Vazquez (2011) tidak menemukan bukti peningkatan efisiensi dan ekuitas pelayanan publik lokal yang terkait dengan desentralisasi di Uganda. Selain itu, Zambok, Asubonteng, Aikins, and Adomako (2016) dalam studi mereka tentang desentralisasi fiskal dan pengurangan kemiskinan di Ghana. Mereka mengamati bahwa desentralisasi fiskal tidak memiliki dampak yang berarti terhadap pengurangan kemiskinan, karena masalah seperti keterlambatan dalam pencairan dana dari pemerintah pusat, sumber daya manusia yang tidak memadai, logistik dan mobilisasi pendapatan yang lemah dari unit-unit pemerintah daerah. Di Indonesia, Abdillah & Mursinto (2016) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Maharajabdinul, Rahmatia, Paddu, & Nursini, (2015) mencoba menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di Indonesia Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan porsi (rasio) total transfer pemerintah ke total pendapatan provinsi tidak secara signifikan mempengaruhi kemiskinan di wilayah timur Indonesia.

Menurut Agyemang-Duah et al., (2018) bahwa sampai saat ini, hubungan antara desentralisasi fiskal dan pengurangan kemiskinan masih diperdebatkan, temuan penelitian masih bersifat spesifik berdasarkan negara dan waktu. Szarowska (2015) juga mengemukakan bahwa beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang heterogen, karena perbedaan dalam ekonometrik, sampel negara, periode observasi, dan pengukuran variabel yang digunakan. Artinya, dampak positif desentralisasi fiskal yang terjadi pada suatu negara atau daerah dalam periode tertentu belum bisa dijadikan tolak ukur bahwa transfer keuangan publik antarpemerintah akan memberikan imbas positif pula di daerah lain pada waktu yang sama (Wibowo, 2008). Martínez-Vazquez (2011) juga menyimpulkan bahwa jawaban atas pertanyaan mengenai dampak desentralisasi belum pasti (uncertainty), dengan demikian masih sangat dibutuhkan tambahan penelitian. Karena itu, penelitian ini menguji desentralisasi fiskal terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bukti baru terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia, sehingga dapat dijadikan aspirasi bagi pengambil keputusan dalam mengambil kebijakan dimasa yang akan datang. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan literatur bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan topik

desentralisasi fiskal dan tingkat kemiskinan. Penelitian ini dibagi menjadi lima bagian utama, yakni pendahuluan, metode penelitian, kajian teori dan pengembangan hipotesis, hasil dan pembahasan, dan simpulan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jeda waktu dalam menguji dampak desentralisasi fiskal terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Fan, et. al (2004) pengeluaran barang modal atau investasi tidak dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat pada saat itu juga atau pada saat dikeluarkan belanja tersebut, pengeluaran barang modal atau investasi dirasakan dampaknya setidaknya paling sedikit tiga tahun. Lindaman and Thurmaier (2002) menunjukkan bahwa indikator pengeluaran dan pendapatan memiliki jeda waktu yang lebih lama daripada indikator pendapatan asli daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.

### **Definisi operasional dan pengukuran variabel**

Variabel penelitian ini terdiri dari Dana Perimbangan (DP), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal (BM) sebagai proksi dari Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemiskinan (TK).

#### **Dana perimbangan**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dalam penelitian ini, dana perimbangan diukur dengan rasio antara realisasi dana perimbangan dengan realisasi total pendapatan daerah kabupaten/kota dalam satuan desimal.

#### **Dana perimbangan pemerintah provinsi**

$\frac{\text{Total pendapatan pemerintah provinsi}}$

#### **Pendapatan asli daerah**

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Penelitian ini mengukur pendapatan asli daerah berdasarkan pada rasio antara realisasi pendapatan asli daerah terhadap realisasi total pendapatan daerah pemerintah provinsi dalam satuan desimal.

#### **Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi**

$\frac{\text{Total Pendapatan Pemerintah Provinsi}}$

#### **Belanja modal**

Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Pada penelitian ini, pengelolaan belanja modal diukur dengan rasio realisasi belanja modal terhadap total pendapatan daerah (provinsi) dalam satuan desimal.

#### **Belanja modal provinsi**

$\frac{\text{Total pendapatan provinsi}}$

#### **Tingkat Kemiskinan**

Kemiskinan adalah suatu situasi dimana pendapatan tahunan individu di suatu kawasan tidak dapat memenuhi standar minimum yang dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak di kawasan tersebut. Tingkat kemiskinan dalam penelitian ini adalah persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan yang dinyatakan dalam desimal.

#### **Metoda analisis**

Analisa penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi. Adapun persamaan regresi penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TK = \beta DP + \beta PAD + \beta BM + e1$$

Dimana:

DP = Dana Perimbangan

---

---

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BM = Belanja Modal

TK= Tingkat Kemiskinan

$\beta$  = Koefisien regresi

e = Error

Praktik desentralisasi pemerintahan di Indonesia menggantikan praktik sentralisasi telah dilakukan sejak orde baru melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, namun perubahan yang signifikan baru dirasakan di era reformasi, yaitu sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah dan 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah. Seiring dengan berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 22 dan 25 dirasa tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu direvisi. Hasil revisi tersebut, lahir Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yang pada hakekatnya memberikan peluang lebih besar kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik menyangkut sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang menjadi kekayaan daerah.

Mardiasmo (2004) mengemukakan bahwa pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Akai and Sakata (2002) mengungkapkan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan kepada pemerintah tingkat yang lebih rendah. Menurut Oates (1993) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional (daerah) akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Senada dengan itu, Bahl and Martinez-Vasquez (2002) mengemukakan bahwa apabila desentralisasi dirancang dengan baik, maka akan mampu membawa pada efisiensi pelayanan publik dan menjadikan pelayanan publik lebih dekat dengan sasaran (masyarakat di daerah), sehingga desentralisasi dapat membantu mengembangkan wilayah dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan derivatif dari kebijakan otonomi daerah sebagai wujud pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah (Situngkir, et. al., 2014). Debnath and Bhattacharjee (2013) transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan memengaruhi kesejahteraan wilayah tersebut. Nathan and Lago (1990) bahwa bantuan dari pemerintah pusat dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan.

Labao, (2012) menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan melalui kapasitas yang mereka miliki salah satunya adalah pendapatan asli daerah. Daerah dengan pendapatan yang berasal dari sumber daerah yang tinggi memiliki kecenderungan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan lebih mampu membiayai program yang lebih banyak (Lindaman and Thurmaier, 2002 dan Guess, 2007). Craw (2010) menyatakan bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan penduduk, pemerintah daerah membutuhkan sumber dana yang diperoleh dari kapasitas fiskal dan bantuan dari pemerintah pusat.

Penelitian Hong & Ahmed (2002) menyatakan bahwa yang salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan adalah melalui belanja barang publik yang kemudian akan memengaruhi pendapatan masyarakat. Penelitian Fan, et. al (2004) menggunakan data tingkat provinsi untuk 1953-2000, dalam penelitian tersebut menemukan bahwa meningkatnya belanja modal pemerintah berkontribusi terhadap pertumbuhan produktivitas pertanian dan mengurangi kemiskinan di pedesaan. Hasil penelitian tersebut sesuai penelitian Fan, et. al . (2000) di India; Fan, et. al. (2005) di Tanzania.

Konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah sebagai salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional. Harapan dari penerapan konsep tersebut adalah terwujudnya kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga akan berimbas kepada kondisi perekonomian yang

---

lebih baik dan akan berdampak pula pada tercapainya kesejahteraan lebih merata di seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, hipotesis penelitian ini diajukan sebagai berikut:

Ha: Terdapat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil analisis regresi

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan apakah model regresi dalam penelitian ini dengan metode estimasi *ordinary least square* (OLS) memberikan hasil yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) atau tidak. Uji asumsi klasik yang dilakukan, terdiri dari uji normalitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Berdasarkan uji asumsi klasik dapat dikatakan bahwa model penelitian ini terbebas dari masalah tersebut.

Tabel 1. Hasil analisis regresi

Model	Coefficients	t-statistic	Probability
DP → TK	-,137	-5,070	,000
PAD → TK	-,221	-8,347	,000
BM → TK	-,027	-,914	,363

Nilai koefisien korelasi seperti yang tertera pada Tabel 3 di atas memperlihatkan bahwa dana perimbangan (DP) sebesar 0,137 dengan nilai t-hitung sebesar -5,070 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi variabel dana perimbangan lebih rendah dari taraf signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 ( $0,00 < 0,05$ ), sehingga dapat diartikan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Sementara itu, nilai koefisien korelasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar -0,221 dan memiliki nilai t-hitung sebesar -8,347 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, lebih rendah dari taraf yang ditetapkan sebesar 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), dengan kata lain bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, nilai koefisien korelasi belanja modal (BM) sebesar -0,027, dan mempunyai nilai t-hitung sebesar -0,914 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,363, lebih rendah dari nilai signifikansi yang dipersyaratkan sebesar 0,05 ( $0,363 > 0,05$ ), sehingga dapat diartikan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Konsep otonomi daerah dan desentralisasi adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional. Harapan dari penerapan konsep tersebut adalah terwujudnya kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga akan berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik dan akan berdampak pula pada tercapainya kesejahteraan lebih merata di seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan pada analisis regresi pada penelitian dibuktikan bahwa desentralisasi fiskal berdampak pada kesejahteraan masyarakat, dalam penelitian ini diukur dengan penurunan tingkat kemiskinan. Dampak tersebut sangat dipengaruhi oleh pengukuran yang digunakan peneliti dalam mengoperasionalkan desentralisasi fiskal itu sendiri.

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa desentralisasi fiskal yang diprosikan dengan rasio transfer pemerintah pusat terhadap total pendapatan daerah provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian hasil penelitian ini sejalan dengan argumentasi Nathan and Lago (1990) yang menyatakan bahwa bantuan dari pemerintah pusat dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Begitupula pernyataan dari Dentnabt, et. al. (2013) yang mengemukakan bahwa transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan memengaruhi kesejahteraan wilayah tersebut. Lebih lanjut, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan temuan Maharajabdinul (2015) yang menunjukkan bahwa peningkatan porsi (rasio) total transfer pemerintah pusat terhadap total pendapatan pemerintah provinsi tidak secara signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan di wilayah Indonesia Timur.

Selanjutnya, analisis pada penelitian ini membuktikan bahwa desentralisasi fiskal yang diprosikan dengan rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, pendapatan asli daerah berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Temuan ini menguatkan pernyataan Lindaman and Thurmaier (2002)

---

---

dan Labao, et al. (2012) yang berpendapat bahwa pendapatan asli daerah sebagai gambaran desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif yang kuat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Begitupula, Craw (2010) menyatakan bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan penduduk, pemerintah daerah membutuhkan sumber dana yang diperoleh dari kapasitas fiskal dan bantuan dari pemerintah pusat. Serupa dengan penelitian Lindaman and Thurmaier (2002) desentralisasi fiskal dalam hal pendapatan asli daerah memiliki efek positif yang kuat pada kebutuhan dasar. Hasil analisis ini sejalan dengan temuan Silas et al. (2018) di Kenya; Sepulveda (2010) yang menemukan efek negatif desentralisasi pendapatan terhadap jumlah penduduk miskin menggunakan data lintas negara. Di Indonesia, Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian Sudewi dan Wirathi (2013) di Provinsi Bali Periode 2003-2011, dimana mereka menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang diukur dengan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan yaitu penurunan persentase jumlah penduduk miskin dan hasil penelitian dari Aulia (2014) yang dilakukan pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2003-2012.

Terakhir, analisis pada penelitian ini juga berhasil menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang diproksikan dengan rasio belanja modal terhadap total pendapatan daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini mengisyaratkan bahwa belanja modal pemerintah daerah dapat mereduksi tingkat kemiskinan di daerahnya. Temuan tersebut, bertolak belakang dengan argumentasi Hong and Ahmed (2009) menyatakan bahwa belanja barang publik akan menambah pendapatan masyarakat sehingga memengaruhi penurunan kemiskinan masyarakat. Penelitian Fan, et. al (2004) menggunakan data tingkat provinsi untuk 1953-2000, dalam penelitian tersebut mengembangkan model persamaan simultan untuk memperkirakan efek dari berbagai jenis pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan dan kemiskinan pedesaan di Cina. Hasil penelitian ini juga sesuai penelitian Fan, et. al (2000) di India; Fan, et. al (2005) di Tanzania. Disisi lain, temuan ini mendukung penelitian Putro, Mintarti, and Wijaya (2017) yang menemukan bahwa belanja modal pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur.

Secara keseluruhan temuan ini menginformasikan bahwa kemiskinan kemungkinan akan berkurang ketika proses desentralisasi fiskal melibatkan peningkatan nyata otonomi pemerintah daerah, peningkatan otonomi pemerintah daerah atas pendapatan dan pengeluaran penting dalam pengurangan kemiskinan (Silas et al., 2018). Kemudian, pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan, itu sangat tergantung dari rasio yang digunakan dalam mengukur desentralisasi fiskal. Selain itu, penelitian ini juga berhasil menunjukkan bahwa dampak dari pengeluaran dan pendapatan terhadap penurunan tingkat kemiskinan, memerlukan jeda waktu. Hal ini sesuai dengan penelitian. Lindaman and Thurmaier (2002) menunjukkan bahwa indikator pengeluaran dan pendapatan memiliki jeda waktu yang lebih lama daripada indikator pendapatan asli daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Juga argumentasi Fan, et. al (2004) yang menyatakan bahwa pengeluaran barang modal atau investasi tidak dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat pada saat itu juga atau pada saat dikeluarkan belanja tersebut, pengeluaran barang modal atau investasi dirasakan dampaknya setidaknya paling sedikit tiga tahun.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada 33 pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jeda waktu selama tiga tahun, yaitu data desentralisasi fiskal tahun 2013 diregresikan dengan data tingkat kemiskinan masyarakat tahun 2015, begitupula data desentralisasi fiskal tahun 2014 dan 2014, dihubungkan dengan data tingkat kemiskinan tahun 2016 dan 2017. Desentralisasi fiskal pada penelitian ini diproksikan dengan dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan belanja modal. Hasil regresi menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang diukur dengan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat. Begitupula, desentralisasi fiskal yang diproksikan dengan pendapatan asli daerah juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat. Sementara itu, desentralisasi fiskal yang diproksikan dengan belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Temuan tersebut menguatkan penelitian sebelumnya. lebih lanjut, informasi penelitian ini penting bagi pejabat

---



---

pemerintahan (eksekutif dan legislatif), dalam menunjukkan peran penting desentralisasi fiskal dalam mereduksi tingkat kemiskinan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang tertarik dengan topik yang sama dengan penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, K., & Mursinto, D. (2016). The effects of fiscal decentralisation, economic growth and income inequality on poverty rate of Indonesia's 3 provinces. *International Journal of Advanced Research*, 4(2), 405–414.
- Agyemang-Duah, W., Kafui Gbedoho, E., Peprah, P., Arthur, F., Kweku Sobeng, A., Okyere, J., & Mengba Dokbila, J. (2018). Reducing poverty through fiscal decentralization in Ghana and beyond: A review. *Cogent Economics and Finance*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/23322039.2018.1476035>
- Akai, N., & Sakata, M. (2002). Fiscal decentralization contributes to economic growth: evidence from state-level cross-section data for the United States. *Journal of urban economics*, 52(1), 93-108.
- Aulia, N. (2014). Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. *Economics Development Analysis Journal*, 3(2).
- Bardhan, P. and D. Mookherjee. (1998). Expenditure Decentralization and the Delivery of Public Services in Developing Countries. Institute for Economic Development Paper No. 90. Boston: Institute for Economic Development, Boston University.
- Cooper, D.R., dan P.S. Schindler. 2014. *Business Research Method*. McGrawHill, Singapore.
- Debnath, A., Roy, N., dan Bhattacharjee, N. (2013) Transfer dependence on northeast states: are the growth effects of grants uniform across states? *The Journal of Applied Economic Research*, Vol. 7, No. 1, pp 117-130.
- Fan, S. (2004). Reforms , Investment , and Poverty in Rural China \*.
- Fan, S. (2005). Public Investment and Poverty Reduction in Tanzania: Evidence from Survey Data. *International Food Policy Research Institute*.
- Fan, S., Hazell, P., & Thorat, S. (2000). Government Spending , Growth and Poverty in Rural India. 82(November), 1038–1051.
- Galasso, E., & Ravallion, M. (2001). Decentralised targeting of an anti-poverty program (Development Research Group Working Paper). Washington D.C: World Bank.selected districts in the Ashanti region, Ghana.
- Guess, George M. (2007). Adjusting fiscal decentralization programs to improve service results in Bulgaria and Romania. *Public Administration Review*, Vol. 67, No. 4 (Jul.-Aug., 2007), pp. 731-744.
- Hartono, J. (2013). *Metodologi penelitian bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Hong, H., & Ahmed, S. (2002). Evidence on Growth and Poverty. 102–108.
- Labao, Linda. 2012. Poverty and place across the United States: Do country governments matter to the distribution of economic disparities?. *International Regional Science review*, Vol. 35 No. 2, pp 158-187.
- Maharajabdinul, Rahmatia, Paddu, A. H., & Nursini. (2015). Contribution Of Fiscal Decentralization To Poverty Reduction In Eastern Indonesia. *IOSR Journal of Business and Management* Ver. III, 17(12), 2319–7668. <https://doi.org/10.9790/487X-171235360>
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

- 
- 
- Martinez-Vazquez, J. (2011). *The impact of fiscal decentralization: Issues in theory and Challenges in practice*. Asian development bank. ISBN 978-92-9092-323-7.
- Nathan dan Lago. 1990. *Intergovernmental Fiscal Roles and Relations*. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 509, pp. 36-47.
- Oates, W. E. (1993). Fiscal decentralization and economic development. *National tax journal*, 46(2), 237-243.
- Putro, P. B. W., Mintarti, S., & Wijaya, A. (2018). Analisis determinasi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. *INOVASI*, 13(2), 121-126.
- Silas, M. P., Wawire, P. N. H. W., & Okelo, P. A. O. (2018). EFFECTS OF FISCAL DECENTRALIZATION ON POVERTY REDUCTION IN KENYA. 6(01). Retrieved from <http://ijer.net/ijer/article/view/937>
- Situngkir, F. (1999). PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA. (1998), 125–137.
- Sudewi, N. N. A., & Wirathi, I. G. A. P. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(3).
- Szarowska, I. (2015). Impact of decentralitaton on economic development in the European Union. *JEL*. Classification: E62, H71, H72, H77.
- Wibowo, P. (2008). Mencermati dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(1), 55-83.
- Zambok, S., Asubonteng, A. A., Aikins, D., & Adomako, I. (2016). *Effects of fiscal decentralization on community representation and poverty reduction, achievements and challenges: case study of some* (Undergraduate Thesis).
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Permendagri No. 59 Tahun 2007.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).